

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta, Jakarta, 2019, hlm. 42.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 82–83.
- Aditya Sanjaya dan Gunawan Widjaja, “Harmonisasi Peraturan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat.”
- Alexy, R., *A Theory of Constitutional Rights* (J. Rivers, trans.), Oxford University Press, Oxford, 2002.
- Ansar, Warni Tune Sumar, dan Zainoedhin Judho Dwi Prasetyo, *Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan*, Deepublish, Sleman, 2022.
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting*, Kanisius, Depok, 2021, hlm. 12.
- C. van Vollenhoven, *Staatsrecht Oversees*, Stenfert Kroese, Leiden/Amsterdam, 1934, hlm. 105.
- Christopher Hood, Henry Rothstein & Robert Baldwin, *The Government of Risk: Understanding Risk Regulation Regimes*, Oxford University Press, Oxford, 2001.
- Dadang Suwada, *Peningkatan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Perda yang Responsif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Fakhry Amin, dkk., *Ilmu Perundang-Undangan*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 42.

- Farida Maria Indrati dan Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 57.
- Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Sanabil, Mataram, 2022, hlm. 19.
- Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (K. Wilk, trans.), Harvard University Press, Cambridge MA, 1950.
- Gustavo Restrepo-Quintero dan Daniel Álvarez, “Ley 617 de 2000 y su impacto fiscal territorial,” Banco de la República, 2005.
- H.D. van Wijk dan W. Koninnenbelt, *Hoodfstukken van Administratiefrecht*, Lemma, Culemborg, 1998, hlm. 149.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 102.
- Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2023, hlm. 21.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Group, Boston, 1991, hlm. 100.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 37.
- Jean-Paul Faguet, *Decentralization and Popular Democracy: Governance from Below in Bolivia*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum*, Nasa Media, Malang, 2010, hlm. 13–17.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Nasa Media, Malang, 2010, hlm. 11.

- Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 42.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra (et al.), *Teori dan Konsep Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia*, CV Zigie Utama, Bengkulu, 2016, hlm. 21–22.
- Malicia Evendia dan Indah Satria, *Hukum Otonomi Daerah*, Suluh Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 11.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61.
- Nancy Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*, Columbia University Press, New York, 2008.
- P.M. Rondonuwu, *Teori Hukum: Dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2023.
- Roberto Mangabeira Unger, *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, The Free Press, New York, 1977, hlm. 7.
- Rosmery Elsy, *Legislasi*, Fakultas Hukum Tata Pemerintahan IPDN, Jatinangor, 2019, hlm. 1.
- Sabine Kuhlmann, Isabella Proeller, dan Dirk Schimank, *Public Administration in Germany*, Springer, Cham, 2021.
- Sadu Wasistiono, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003, hlm. 79.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Memperkuat Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 10.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1–6.

Sobirin Malian, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 46.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 60.

Jurnal

288

Achmad Fahrur Rozi et al., “Analisis Konsep, Prinsip, dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan bagi Kreditur dan Debitur di Indonesia,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 3, hlm. 141–146, 2023.

Aditya Sanjaya dan Gunawan Widjaja, “Harmonisasi Peraturan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat,” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 63–80.

Aditya Wisnuwardhana Djajaatmadja dan Tri Sulistyowati, “Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah di Kabupaten Cianjur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

²⁸⁸ Achma Achmad Soeharto, “Keadilan dalam Optik Hukum Alam dan Positivisme Hukum,” *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Vol. 36, 2022, hlm. 62–72.

Perundang-Undangan,” *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1 No. 2, hlm. 1–20, 2019, (<https://doi.org/10.25105/refor.v1i2.10519>).

Agusra Rahmat, Darmini Roza, dan Beatrix Benni, “Implementasi Kewenangan DPRD Kota Pariaman dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif,” *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 251–264.

Anang Dwiatmoko dan Harsanto Nursadi, “Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah melalui Harmonisasi yang Sentralistik,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 3, 2022, hlm. 292–306.

Anisyaniawati et al., “Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 3 No. 1, hlm. 1–14, 2025, (<https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>).

Anwar Sodik, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan*, Edisi Pertama, Ashyara Media Indonesia, Kendal, 2021, hlm. 296.

Ardhyta Putri Alisya, “Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Lex Administratum*, Vol. VII No. 3, hlm. 23-32, 2016.

Arie Elcaputera, Ahmad Wali, dan Ari Wirya, “Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Rangka Penguatan

Otonomi Daerah,” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 11 No. 1, hlm. 121–136, 2022.²⁸⁹

Arnoldus Jansen Patrio Banola, dkk., “Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia,” *Constituto: Journal of State and Political Law Research*, Vol. 4 No. 1, 2025, hlm. 68–79.

Ayu Wulandari & Sidi Ahyar Wiraguna, “Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law Dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, hlm. 52-63, 2025, (<https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1613>).

Azis Achmad, “Reduksi Otonomi Seluas-luasnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,” *Risalah Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2008, hlm. 120–127.

Baehaqi, “Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Membatalkan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota Kajian Terhadap Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016,” *Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 1, hlm. 25-41, 2018.

Basri Mulyani, “Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 2 No. 1, hlm. 91-113, 2020, (<https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.183>).

²⁸⁹ Elcaputera, Wali, and Wirya, “URGENSI HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH : Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah.”

Basuki Kurniawan dan Nita Ryan Purbosari, “Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Mediasi,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, Vol. 14 No. 1, 2022, hlm. 87.

Benni Erick & T. Risman, “Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kritis Peralihan Kewenangan Pengujian dari Eksekutif ke Yudikatif),” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 6 No. 2, hlm. 805-821, 2023, (<https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.2096>).

Budi Astuti dan Muhammad Rusdi Daud, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online,” *Al-Qisth Law Review*, Vol. 6 No. 2, hlm. 205, 2023, (<https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>).

Claudya Mareshky, Kanaya Ayudya Putri & Ngesti Mukti Rezeki, “Reformasi Kelembagaan Ombudsman: Prospek Cabang Keempat Pemerintahan Indonesia untuk Akuntabilitas dan Pengawasan Hak Warga Negara,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No. 3, hlm. 247-268, 2024.

Darmini Roza dan Gokma Toni Parlindungan S, “Perundang-undangan untuk Mewujudkan Indonesia,” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 141–142.

Desip Triananda, “Pembatalan Peraturan Kepala Daerah: Studi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018,” *Ijtihad*, Vol. 38 No. 1, hlm. 15-26, 2022.²⁹⁰

Diana Yusyanti, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah,” *Jurnal Rechts Vinding: Media*

²⁹⁰ Triananda, “Pembatalan Peraturan Kepala Daerah: Studi Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.”

Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 4 No. 1, hlm. 85-103, 2015, (<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.49>).

Fairus Dhea Salma, Sukardi, dan Radian Salman, “Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi,” *Cakrawala: Jurnal Humaniora*, Vol. 19 No. 1, 2025, hlm. 35–52.

Faisal Syarifudin, “Standing on the Shoulders of Giants: Perspektif Kritis Kepustakawanan Mengenai Plagiarisme sebagai Penyimpangan Intelektual,” *Al-Kuttab: Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 8.

Febri Maulana Rizki Nababan, “Kedudukan Eksekutif dalam Implementasi Penataan Regulasi Nasional,” *Hangluan Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 73–116.

Fika Pramawati, Eka Suaib, dan Erni Qomariyah, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023,” *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 15 No. 2, 2024, hlm. 171–182.²⁹¹

Firdaus Arifin, “Analisis terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah di Era Desentralisasi Asimetris,” *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. XVIII No. 2, 2024, hlm. 208–235.

Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, dan Putri Difa Zhafirah, “Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplifikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan

²⁹¹ Pramawati, Suaib, and Qomariyah, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023.”

Efektivitas Hukum,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2024, hlm. 699–711.

Gokma Toni Parlindungan, “Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16 No. 2, hlm. 384-400, 2018, (<https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1447>).

H. Kurniawati dan A. Rengga, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011–2031 (Studi Kasus Penataan ...),” *Journal of Public Policy and ...*, Vol. 5 No. 2, 2016.

Haeril Akbar, Sukardi, dan Radian Salman, “Dualisme Pengawasan Preventif: Tantangan Harmonisasi dan Fasilitasi dalam Pengawasan Peraturan Daerah,” *Amanna Gappa*, Vol. 33 No. 1, 2025, hlm. 1–17.

Herman Bastiaji Prayitno dan Cecep Miptahudin, “Kepastian Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat oleh Notaris dengan Mengesampingkan Perbuatan Tindak Pidana,” *Pamulang Law Review*, Vol. 4 No. 2, hlm. 181–190, 2021.

Hermi Sari B.N., Galang Asmara, dan Zunnuraeni, “Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 22 No. 2, 2020, hlm. 314–335.

Hilmy Nurfaizan Abdul Matin, dkk., “Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah,” *Integralistik*, Vol. 36 No. 1, 2025, hlm. 51–69.

292

Ibnu Sina Chandranegara, “Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 3, 2019, hlm. 435–457.

Indah Pratiwi, Yuliandri, dan Dian Bhakti Setiawan, “Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham,” *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7 No. 4, 2024, hlm. 1167–1180.

293

J. Hartley, E. Sørensen & J. Torfing, “Collaborative Innovation: A Viable Alternative to Market Competition and Organizational Entrepreneurship,” *Public Administration Review*, Vol. 73 No. 6, hlm. 821–830, 2013, (<https://doi.org/10.1111/puar.12136>).

Jaga Rudi, “Penyelarasan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Langkah Reformasi Hukum di Indonesia,” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No. 4, hlm. 215–233, 2023, (<https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1474>).

Kartiko Harnadi, “Model Penyelesaian Hukum Tanah di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 22 Way Waya yang dikuasai oleh Masyarakat Desa Margosari Kabupaten Pringsewu,” Universitas Lampung, 2018.

²⁹² Husin Ilyas, “Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah,” *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4 No. 4, 2012, hlm. 273–280.

²⁹³ Isrok, “Korelasi antara Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah dengan Tingkat Investasi ke Daerah,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 4, 2009, hlm. 551–568.

Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 31.

Lusy Liany, “Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-Adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016,” *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2, hlm. 21-47, 2019.

Luthfiyah Rosyida, “Hambatan Penataan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kompetensi (Studi pada DLH Provinsi Jawa Timur),” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 2, hlm. 226–237, 2021.²⁹⁵

Mario Agritama S.W. Madjid, dkk., “Politik Hukum dan Problematika Harmonisasi Peraturan di Bawah Undang-Undang melalui Undang-Undang Cipta Kerja,” *Japhtn-Han*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 305–336.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, hlm. 13–14, 2019, (<https://doi://10.23920/jbmh.v6i1.324>)

²⁹⁴ Keysha Nashwa Aulia (et al.), “Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi,” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 714–724.

²⁹⁵ Rosyida, “Hambatan Penataan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kompetensi (Studi Pada DLH Provinsi Jawa Timur).”

²⁹⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 13–14.

Meddy Nurpratama dan Agus Yudianto, “Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Notaris/PPAT Maisarah Pane, S.H., Kabupaten Indramayu,” *Jurnal Investasi*, Vol. 7 No. 4, 2021, hlm. 62.

Monica Descariana dan Jadmiko Anom Husodo, “Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah,” *Res Publica*, Vol. 8 No. 1, hlm. 39–48, 2024.

Muhamad Sadi Is, “Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, 2020, hlm. 318.

Muhammad Miftahul Huda, Suwandi, dan Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 115–134.

Muhammad Oki Nugroho, Paisol Burlian, dan Arne Huzaimah, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengharmonisan, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Raperda Provinsi Pasca Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 759–778.

Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 19, hlm. 21-37, 2014, (<https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>).

- Muklis Al'anam, "Moralitas Hukum dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, dan Hans Kelsen," *Law Jurnal*, Vol. 5 No. 2, hlm. 146–157, 2025, (<https://doi://10.46576/lj.v5i2.6015>).
- Prandy A. L. Fanggi, "Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1 No. 2, hlm. 309–316, 2025.
- Prandy A.L. Fanggi, "Analisis Konseptual *Stufenbau Theory* terhadap Tata," *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1 No. 2, 2025, hlm. 309–316.
- Putera Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum," *Yustisia*, Vol. 90, 2014, hlm. 8.
- R. Gyurita, "The Instruments of Administrative Supervision of Local Governments in Hungary," *Financial Law Review*, Vol. 17 No. 1, hlm. 24–51, 2020, (<https://doi.org/10.4467/22996834FLR.20.003.12044>).
- Ranggi Ade Febrian, "Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 41–49.
- Riri Nazriyah, "Peranan Cita Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 20, 2002, hlm. 136–151.
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, "Harmonisasi Norma-Norma dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim," *Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 7.

- Riza Novandra, “Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016,” *RechtIdee*, Vol. 14 No. 2, hlm. 186-206, 2019.
- Rizky Andrian Ramadhan Pulungan dan Lita Tyesta A.L.W., “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 280–293.
- Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law,” *Nurani Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 12–22, 2020, (<https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>).
- Rosa Desi Natalisma Manurung dan Janpatar Simamora, “Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham,” *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 9 No. 4, 2024, hlm. 74–86.
- Rudy (et al.), “Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dalam Siklus Pembentukan Peraturan,” *KNAPHTN*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 319–354.
- Ryan Martha Hudi, “Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan UU Otonomi Daerah,” *Indragiri Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 80–86.
- S. Mahliati, dkk., “Optimalisasi Legal Drafting dalam Mencegah Tumpang Tindih Peraturan (*Optimizing Legal Drafting to Prevent Overlapping*

Regulations),” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3 No. 2, 2025, hlm. 1221–1235.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, dan Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 1, hlm. 88–100, 2020.

Siti Zuhro, “Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia,” *Interaktif Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10 No. 1, hlm. 1-28, 2018.²⁹⁷

Ulfa Armin, Kosariza Kosariza & Anzorullah Anzorullah, “Analisis Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah,” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 3 No. 2, hlm. 261-279, 2023, (<https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.24215>).

Urwatul Wutsqah & Erham, “Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme,” *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4 No. 2, hlm. 771-784, 2024, (<https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595>).

Usup Supriatna, Irfan Sanusi, dan Asep Iwan Setiawan, “Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai melalui Pengawasan Atasan di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 210.

²⁹⁷ Zuhro, “Demokrasi, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia.”

Victor Juzuf Sedubun, “Kajian Filsafat Hukum tentang Pembentukan Peraturan Daerah,” *Sasi*, Vol. 16 No. 3, 2010, hlm. 18.

W. de A. Mendes, L. de P. Rocha, M. A. M. Ferreira, dan E. R. de Faria, “Papel do Tribunal de Contas no Controle Financeiro Municipal,” *Revista Contemporânea de Contabilidade*, Vol. 17 No. 42, hlm. 103–118, 2020, (<https://doi.org/10.5007/2175-8069.2020v17n42p103>).

Wacipto Setiadi, “Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Legislatif Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Juni 2007, hlm. 48.

Yogi Setiawan et al., “Analisis Kritis terhadap Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Keadilan Sosial di Negara Hukum,” *YURISDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, hlm. 40-48, 2025.

Zainal Amaluddin & Erjan Saputra, “Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah,” *Al-Sulthaniyah*, Vol. 10 No. 1, hlm. 60-75, 2021, (<https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.387>).

Penelitian Terdahulu

Inche Sayuna, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang*

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tesis), Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hlm. 16.

Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara* (Disertasi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 94.

Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel)* (Tesis), Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 94.

Internet

“Act on Local Government (2011 CLXXXIX),” Hungaria, (<https://legislationline.org>).

“Constitution of Bulgaria (1991),” *Constitute Project*, Pasal 136 dan 144, (<https://www.constituteproject.org>), diakses 15 Oktober 2025.

“Constitution of Japan (1947),” *International City/County Management Association*, Pasal 92, (<https://icma.org>), diakses 15 Oktober 2025.

“Decentralization and Prefectoral Control in France,” *Congress of Local and Regional Authorities*, (<https://www.congress-monitoring.eu>), diakses 15 Oktober 2025.

“Fundamental Law of Hungary (2011),” *Legislation Online*, Pasal 32 ayat (4)–(5), (<https://legislationline.org>), diakses 15 Oktober 2025.

“Le contrôle de légalité,” *Collectivités Locales*, (<https://www.collectivites-locales.gouv.fr>), diakses 15 Oktober 2025.

“Local Self-Government Act (1991),” Bulgaria, (<https://www.constituteproject.org>).

A.A. Oka Mahendra, “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan,” (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>)

Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, *The Situation of Local Finances in the Federal Republic of Germany*, Council of Europe, Strasbourg, 2022, (<https://rm.coe.int/1680748104>).

Congress of Local and Regional Authorities, “Monitoring Report on Iceland,” Pasal 110–114, (<https://www.congress-monitoring.eu>), diakses 15 Oktober 2025.

Congress of Local and Regional Authorities, *Local and Regional Democracy in Italy – 33rd Session Report*, Council of Europe, Strasbourg, (<https://rm.coe.int/local-and-regional-democracy-in-italy-monitoring-committee-rapporteurs/1680759b3b>).

Congress of Local and Regional Authorities, *Report on the Situation of Local and Regional Democracy in Bulgaria (Council of Europe, Doc. CG(27)-14)*, Council of Europe, Strasbourg, 2014, (<https://rm.coe.int/1680748104>).

Constitución Política de la República de Costa Rica (1949), arts. 169–170, *Constitute Project*, (<https://www.constituteproject.org>), diakses 15 Oktober 2025.

Constituição da República Federativa do Brasil [Constitution of the Federative Republic of Brazil] 1988, arts. 30–31 (Brasil), (<https://www.constituteproject.org>).

Constituição, arts. 30–31, (<https://www.constituteproject.org>).

Constitute Project, “Colombia’s Constitution of 1991,” Article 1, (<https://www.constituteproject.org>), diakses 20 Oktober 2025.

Constitute Project, “Finland’s Constitution of 1999 with Amendments through 2011,” Section 121, (<https://www.constituteproject.org>), diakses 20 Oktober 2025.

Constitute Project, “Mexico’s Constitution of 1917 with Amendments through 2015,” Article 115, (<https://www.constituteproject.org>), diakses 20 Oktober 2025.

Constitution of Belgium, Pasal 162 (1831, rev. 2014), (<https://www.constituteproject.org>), diakses 10 Oktober 2025.

Constitution of Bulgaria, Pasal 144, (<https://www.constituteproject.org>), diakses 20 Oktober 2025.

Constitution of the Czech Republic (1993), art. 8, 99(6), Constitute Project, (<https://www.constituteproject.org>), diakses 15 Oktober 2025.

Constitution of the Republic of Iceland, Pasal 78 (1944), (<https://www.refworld.org>), diakses 10 Oktober 2025.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 2/2010, 14 Januari 2010, (https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/sentenze-corte-costituzionale/BGG_REL_sentenza_n2_14_01_2010.pdf).

Costa Rica, *Ley No. 134-90, Diario de la República* No. 87 (1990, revisi 2015), *SNG-WOFI*, (<https://www.sng-wofi.org>), diakses 15 Oktober 2025.

Costituzione della Repubblica Italiana [Constitution of the Italian Republic] 1948, arts. 119–120 (Italia), (<https://www.constituteproject.org>).

Council of Europe, “Congress of Local and Regional Authorities: Report on Local Autonomy in the Netherlands,” (<https://www.rm.coe.int>), diunduh 10 Oktober 2025.

European Committee of the Regions, “Iceland: Division of Powers,” (<https://portal.cor.europa.eu>), diakses 15 Oktober 2025.

Finlandia, *Municipalities Act (Laki kuntien toiminnasta 410/2015)*, (<https://www.vm.fi>), diakses 20 Oktober 2025.

Fundamental Law of Hungary, Pasal 32, (<https://www.legislationline.org>), diakses 20 Oktober 2025.

Gemeindeordnung [Municipal Code] (Jerman), dalam *Springer Link*, (<https://link.springer.com>); *Grundgesetz, art. 28*, (<https://www.gesetze-im-internet.de>).

Government of Finland, “Municipal Functions,” (<https://www.vm.fi>), diakses 20 Oktober 2025.

Government of the Netherlands, “Constitution of the Kingdom of the Netherlands,” Pasal 124, (<https://www.government.nl>), diakses 10 Oktober 2025.

Government of the Netherlands, “Generic Supervision of Local Authorities,” (<https://www.government.nl>), diakses 25 Oktober 2025.

Grundgesetz [Basic Law] 1949, art. 28(2) (Jerman), (<https://www.gesetze-im-internet.de>)

International House Leuven, “Local Government in Belgium,” (<https://www.internationalhouseleuven.be>), diakses 10 Oktober 2025.

Konstitusi Bolivia 2009, Pasal 213–217, dalam: *Constitute Project*, (<https://www.constituteproject.org>), diakses 20 Oktober 2025.

Konstitusi Honduras 1982, rev. 2013, Pasal 222, dalam: Georgetown University Political Database of the Americas, (<https://pdba.georgetown.edu>), diakses 20 Oktober 2025.

Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali [Consolidated Law on Local Authorities], *D.Lgs. 267/2000, arts. 134–136 (Italia)*, (<https://www.constituteproject.org>).

Tribunal Superior de Cuentas, “Historia del Tribunal Superior de Cuentas,” (<https://www.tsc.gob.hn/index.php/historia-del-tribunal-superior-de-cuentas-honduras/>), diakses 20 Oktober 2025.

Undang-undang No. 134-90 tentang Kotamadya Honduras (Decreto 134-90, 1990), sebagaimana dikutip dalam: SNG-WOFI, (<https://www.sng-wofi.org>), diakses 20 Oktober 2025.

UNDP, *Local Governance for Effective Decentralization: Principles, Policies and Practices*, United Nations Development Programme, New York, 2016, (<https://www.undp.org/publications/local-governance-effective-decentralization>).

Lainnya

“Local Autonomy Act (1947, as amended),” Jepang.

Code Général des Collectivités Territoriales, art. L2122-17.

Congress of Local and Regional Authorities, *Report on the Situation of Local and Regional Democracy in Denmark (Doc. CG(2022)43-18)*, 25 Oktober 2022.

Constitute Project, “Finland’s Constitution”; Government of Finland, “Municipal Functions.”

Constitution de la République Française (1958), art. 72; *Code Général des Collectivités Territoriales*, art. L1111-1.

Czech Republic, *Act No. 128/2000 on Municipalities (Local Self-Government Act)*.

Estado Plurinacional de Bolivia, *Ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóñez”*, La Paz, Bolivia, 19 Juli 2010.

Khairul Fahmi et al., *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013, hlm. 162.

Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, *Analisis terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 105.

Novianto M. Hantoro, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009–2029*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9.

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 39.

OECD, “Czech Republic: Administrative Supervision of Local Governments,” *OECD Multi-level Governance Studies*, 2020.

OECD, *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*, OECD Publishing, Paris, 2019, (<https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en>).

OECD, *Regulatory Policy Outlook 2021*, OECD Publishing, Paris, 2021, (<https://doi.org/10.1787/38b0fdb1-en>).

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Japan: Local Government at a Glance*, OECD Publishing, Paris, 2007, (https://www.jlge.org.uk/en/pdfs/Chapter_1.pdf).

Patoni, “Keadilan Pemimpin: Teladan Khalifah Umar Bin Khattab,” NU Online, 2021, (<https://nu.or.id/sirah-nabawiyah/keadilan-pemimpin-teladan-khalifah-umar-bin-khattab-rkcKH>).

Republic of Iceland, “Local Authorities Act No. 138/2011,” Bab XI. *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden*, “Wet Revitalisering Generiek Toezicht,” No. 233, 2012.